

Email: [uneslawreview@gmail.com](mailto:uneslawreview@gmail.com)Online: <http://review-unes.com/index.php/law>

Volume 2, Issue 3, Maret 2020

## JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

<sup>1</sup>Rinal Efries Situmeang, <sup>2</sup>Irene Svinarky, <sup>3</sup>Lisa Simamora

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: [pb160710021@upbatam.ac.id](mailto:pb160710021@upbatam.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Program Studi ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: [irene@puterabatam.ac.id](mailto:irene@puterabatam.ac.id)

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: [pb160710050@upbatam.ac.id](mailto:pb160710050@upbatam.ac.id)

### ABSTRACT

*Fiduciary is shift that did by fiduciary owner to fiduciary receiver, while for up object ability that present on object owner. Number law 42 Years 1999 about Fiduciary Surety or more recognized with UUJF is attributed to make and gives protection of the parties so fiduciary transactions to the fore also expected to qualify law on fiduciary. Fiduciary will erase if object that made by indemnity being paid off by its loan, while is fiduciary was placed to an object really being prohibited for fiduciary giver for vouch in as indemnity is back but a long cry intention of Section 17 UUJF with Section 23 sentences (2) UU JF . In Section 23 sentences (2 ) bear out one of rule it that object that becomes fiduciary indemnity can be shifted if get agreement in writing of fiduciary receiver but variably its thing with what does he meant on Section 25 sentences (1) UUJH. Section 25 sentences (1) UUJH where terminological its formulation that fiduciary indemnity delete because of that fiduciary indemnity is alone was demolish; then indemnity that is used for fiduciary was end its book debt; then fiduciary giver to fiduciary receiver; rights release on fiduciary indemnity by fiduciary receiver; and if goods that becomes fiduciary indemnity disappear therefore fiduciary will erase. Observational type that is used in this research is jurisdictional observational type normative. Fiduciary indemnity terminological UUJF bases Section 17 be borne out that: Information hits indemnity object as object that stills in fiduciary indemnity and still enrolled therefore fiduciary giver is prohibited to do fiduciary and Section 17 not if fiduciary receiver accept therefore get to make that indemnity as back indemnity without ask for fiduciary indemnity deletions as royal. To the effect to list that fiduciary back as surety of giving afters fiduciary fiduciary pays off that goods is subject to be not remove prefentif's rights divides fiduciary receiver.*

**Kata Kunci:** Fidusia Repeat; Roya Fidusia; Prespektif Hukum

## PENDAHULUAN

Dalam menghadapi persaingan usaha dan juga pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini, banyak sekali lembaga pembiayaan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Masyarakat yang memiliki berpenghasilan rendah (menengah ke bawah) yang sulit untuk membeli suatu barang tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal tersebut karena adanya lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mempermudah untuk membeli barang yang menjadi barang konsumsi masyarakat. Pelaksanaan pembiayaan tentunya harus melalui tahap perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan calon pihak konsumen (debitur) atau nasabah ataupun klien untuk membuat perjanjian pokok atau perjanjian kredit (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 1). Pemberian bantuan berupa kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat, maka masyarakatpun juga harus mengenal beberapa jenis kredit yang menggunakan pembiayaan.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang sering dipergunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya seperti: a. Pembiayaan dengan modal pinjaman (kredit perbankan); b. Pembiayaan dengan modal penyertaan (penjualan saham dan modal ventura); c. Pembiayaan dengan pengalihan piutang (*factoring*), pembiayaan dengan sewa menyewa guna usaha (*leasing*) dan pembiayaan dengan penerbitan surat berharga (*commercial paper, promes* dan *obligasi*) (Naja, 2009).

Khusus kegiatan bank dalam memberikan jasa keuangan terkadang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu agar keinginan dari nasabahnya tercapai. Salah satu persyaratan tersebut adalah calon Debitur harus menyerahkan suatu jaminan baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Apabila calon Debitur menjaminkan benda bergerak di bank, maka akan dibuatkan perjanjian jaminan fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, Hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pada tanggal 5 Maret 2013, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Edaran Nomor AHU-06.OT. 03.01 tentang Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*online*) yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Mengenai tata cara pendaftaran fidusia secara elektronik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Pendaftaran Jaminan Fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima jaminan fidusia. Selain itu dalam penelitian ini digunakan teori hukum positif yang mana menelaah dari pengertian di dalam hukum, metodologi hukum yang menyangkut metodologi pembentukan hukum, dan metodologi penerapan. Istilah positif dalam hukum positif memiliki kandungan makna mengenai hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*). Oleh sebab itu, dengan adanya aturan yang telah berlaku mengenai fidusia, maka aturan yang telah ditetapkan di dalam UUJF harus di taati oleh pemberi fidusia dan juga penerima fidusia (Ibrahim, 2005: 85)

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimanakah Jaminan Fidusia menurut UUJF Apabila Dijaminkan Kembali Sebelum Dilakukannya Penghapusan Fidusia?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001: 61) Pendekatan yang digunakan di dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi penelitian yaitu studi dokumen, data sekunder dan studi kepustakaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Jaminan Fidusia menurut UUJF Apabila Dijaminkan Kembali maka Dilakukannya Penghapusan Fidusia**

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris. Pentingnya sebuah akta dalam hal pembuktian, membuat notaris yang mempunyai kewenangan untuk itu harus lebih hati-hati dalam membuatnya. Hal ini mengingat akan kemungkinan kecurangan yang terjadi seperti objek yang belum dilakukannya penghapusan fidusia yang sering diberikan sebutan belum di fidusianya belum di roya tetapi kembali tetap dilakukan penjaminan barang yang sama. Bahasa Roya lebih tepat diletakkan pada jaminan Hak Tanggungan, namun sering sekali dalam bahasa sehari-hari fidusiapun ketika bank mau melakukan penghapusan fidusia sering juga istilah roya disebut dalam penghapusan fidusia.

Pendaftaran merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut mempunyai arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa objek yang sudah dibebankan dengan perjanjian jaminan fidusia tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang sia-sia.

Pendaftaran jaminan fidusia yang dimulai dari proses pembebanan. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah dalam rangka kepastian hukum. Pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain.(Salim HS:2011:82)

Dikeluarkannya peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara Elektronik maka terjadi perubahan cara pendaftaran jaminan fidusia dari manual menjadi *online*. Pada prinsipnya tidak ada yang berubah dari sistem pendaftaran ini, namun jika sebelumnya pendaftaran dilakukan langsung menemui kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan bermacam berkas sebagai persyaratan pendaftaran, kini pemohon hanya perlu mengakses *website* [www.fidusia.ahu.go.id](http://www.fidusia.ahu.go.id).

Ada hal-hal yang penting dalam Fidusia on-line untuk segera diakomodasi yaitu masalah royalti jaminan fidusia dan perubahan-perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia. Ini harus segera di atasi karena untuk mencegah fidusia ulang. Dibalik kemudahan tersimpan berbagai peluang pelanggaran dan diantaranya peluang pelanggaran royalti fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu :

1. Hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Terhadap hapusnya jaminan fidusia maka menjadi kewajiban penerima fidusia untuk melakukan royalti fidusia paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.

Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena benda yang telah dibebani fidusia bukan milik pemberi fidusia tetapi hak kepemilikannya telah beralih kepada penerima fidusia. Pemberi fidusia baru bisa mengfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut diroyalti fidusia. Dilakukannya royalti fidusia menandakan objek tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijaminkan kembali sebagai objek jaminan fidusia. Jika objek jaminan tersebut tetap didaftarkan padahal belum dilakukan royalti maka dalam hal ini pemberi fidusia telah melakukan fidusia ulang.

Salah satu tujuan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menjamin kepastian hukum. Hal yang lebih penting menurut J. Satrio, adalah dengan pengaturan secara lebih pasti melalui undang-undang mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, diharapkan akan sangat menambah kepastian hukum mengenai hal itu. Mengkaji norma hukum berarti mengkaji substansi hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman substansi hukum adalah berkorelasi

dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, apakah materinya telah sesuai dengan isu-isu hukum yang ada di masyarakat.

Norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang akibat dari perbuatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Kalau dilihat dari segi sifatnya sanksi ini dijatuhkan untuk mendidik kepada seseorang atau untuk mengobati. (Modakir Iskandar Syah, 2008:18) Produk hukum berupa aturanaturan harus mempunyai ketegasan sehingga menjamin kepastian dalam pelaksanaannya. untuk itu perlu dikaji seberapa tegas pengaturan mengenai roy fidusia dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dibahas peraturan terkait jaminan fidusia ditinjau dari kepastian hukumnya.

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  
Melihat ketentuan pasal 25 ayat (3) ini, belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Pasal ini hanya bersifat anjuran dan bukan suatu kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan roy fidusia. Penerima fidusia hanya dianjurkan untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi Undang-Undang Jaminan Fidusia ini juga tidak mencantumkan aturan mengenai sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan roy fidusia. Tentunya pasal ini masih jauh dari kata tegas dan pada akhirnya akan diragukan dalam kepastian pelaksanaannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia  
Peraturan pemerintah ini sebenarnya sudah cukup tegas mengatur mengenai roy fidusia. Terlihat dari adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi dengan adanya masa tenggang yang sudah ditentukan yaitu paling lambat 14 hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.  
Namun Hal ini belum cukup untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan roy fidusia. Seandainya penerima fidusia tidak mau melakukan roy fidusia, tentunya aturan ini hanya sebatas huruf-huruf mati yang tidak bisa ditindak lanjuti terhadap pelanggarannya karena aturan ini tidak menyediakan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya demi terciptanya kepastian hukum.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.  
Peraturan menteri keuangan ini hanya sebatas mengatur tentang ketegasan kewajiban pendaftaran saja yang disertai sanksi bagi pelanggarnya. Namun, tidak ditemukan satu pengaturanpun yang menyebutkan tentang roy fidusia.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait dengan penghapusan royalti fidusia ini, yaitu sama-sama belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Sebab, peraturan ini juga masih bersifat anjuran bukan suatu kewajiban untuk melakukan royalti fidusia dan juga di dalam peraturan ini tidak ditemukan adanya suatu sanksi yang diberikan terhadap penerima fidusia yang tidak mau melakukan royalti fidusia. Tentunya peraturan ini juga masih jauh dari kata tegas untuk menciptakan kepastian hukum.

Semua aturan yang mengatur mengenai jaminan fidusia tersebut di atas ternyata belum begitu tegas mengatur mengenai royalti fidusia. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap royalti fidusia itu sendiri. Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum. Agar tercipta kepastian hukum dalam perbuatan-perbuatan hukum yang ada dimasyarakat, maka harus berfungsinya sistem-sistem hukum yang ada. Salah satu sistem hukum yaitu substansi hukum. Substansi Hukum berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, apakah telah mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat.

Wujud dari ketegasan aturan yaitu adanya sanksi. Sanksi yang dinyatakan tegas di dalam hukum sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakannya.

Suatu pengaturan yang tidak dinyatakan secara tegas dalam bentuk undang-undang, maka baik pihak yang diperintah maupun para pejabat sendiri, sering tidak merasa berkewajiban untuk mematuhi. Aturan yang tegas akan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perintah tersebut. Produk hukum yang mengatur royalti fidusia masih dirasa lemah. Lemahnya produk hukum tentang royalti fidusia belum mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat. Ketidaktegasan produk hukum tersebut berakibat sulit menciptakan kepastian hukum, Tidak tegasnya produk hukum tersebut menandakan tidak adanya kepastian hukum royalti fidusia, sehingga royalti fidusia ulang akan tetap mungkin terjadi.

Terhadap objek jaminan kredit yang diikat dengan suatu lembaga jaminan seperti hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia, harus dilakukan pembebasan pembebanannya. Sepanjang pembebanan objek jaminan kredit dilakukan melalui

kewajiban pendaftaran, penghapusan pembebanan utang terhadap objek jaminan kredit tersebut dilakukan oleh instansi tempat dilakukannya pendaftaran pembebanan. Melihat kepada sistem jaminan pada hak tanggungan, ketika debitor telah melunasi seluruh kewajiban pelunasan kreditnya, dilakukan roya atas pembebanan hak tanggungan tersebut menandakan kondisi tanah tersebut telah menjadi bersih dari pembebanan hutang. Begitu juga pada sistem jaminan fidusia status dari objek jaminan fidusia yang belum dilakukan roya fidusia belum dinyatakan bersih dari sifat jaminan yang melekat kepada objek tersebut.

Objek jaminan fidusia dinyatakan masih terdaftar pada Kantor jaminan Fidusia sampai dengan dilakukannya roya fidusia. Royo fidusia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemberi fidusia. Terhadap objek jaminan fidusia yang belum di roya, tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Jika objek jaminan tersebut ingin dijamin kembali sebagai objek jaminan fidusia maka objek tersebut harus diroya terlebih dahulu. Terkait dengan objek jaminan fidusia yang difidusiakan kembali padahal belum dilakukan roya fidusia termasuk kedalam fidusia ulang dan hal itu dilarang oleh undang-undang jaminan fidusia.

Selama penerima fidusia belum memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia dan kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan keterangan sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku, benda yang menjadi objek jaminan fidusia belum hapus dan tetap melekat sebagai jaminan hutang. Jadi tujuan roya fidusia adalah untuk membebaskan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bebas dari jaminan fidusia. Terhadap objek jaminan yang belum diroya fidusia tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Ada beberapa akibat hukum yang timbul jika pemberi fidusia melakukan fidusia ulang, yaitu :

1. Kreditor Kedua Kehilangan Hak Preferentnya Apabila terjadi suatu benda yang sama dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan (hak preferent) diberikan kepada kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Artinya jika kreditor pertama sudah mendaftarkan objek jaminan fidusia, maka meskipun kreditor kedua juga mendaftarkan, ia akan tetap kehilangan hak preferentnya,
2. Pemberian Sanksi Pidana Kepada Pemberi Fidusia Akibat dari perbuatan pemberi fidusia yang melakukan secara sadar fidusia ulang, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 35 kepada



debitor yang nakal karena memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga terjadi fidusia yang dilarang ini, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pemberian sanksi pidana kepada pemberi fidusia yang melakukan fidusia ulang ini dinilai wajar dan tepat, sebab pemberi fidusia secara sadar telah beritikad buruk menyesatkan kreditor. Persoalannya akan berbeda jika Fidusia ulang tersebut dilakukan pada objek yang belum diroya fidusia. Fidusia ulang yang dilakukan pemberi fidusia atas objek yang belum diroya oleh penerima fidusia, memang termasuk kedalam unsur fidusia ulang yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan terhadap pelanggaran pasal ini berakibat diberikan sanksi berupa penjatuhan pidana kepada pemberi fidusia sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Namun, ditinjau menurut Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa yang berkewajiban untuk melakukan royalti fidusia adalah penerima fidusia, bukan pemberi fidusia. Jadi, jika dikemudian hari pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang karena menjaminkan kembali objek tersebut, itu bukan merupakan kesalahan dari pemberi fidusia, melainkan kesalahan dari penerima fidusia yang tidak melakukan royalti fidusia sehingga terjadi fidusia ulang.

Pemberi fidusia dalam hal ini sebenarnya sudah berhak atas jaminan tersebut karena sudah melakukan pelunasan hutang. Hapusnya jaminan fidusia berarti pemberi fidusia secara hukum sudah berhak kembali atas jaminan tersebut. Jadi tidak ada yang menghalangi pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali objek jaminan fidusia tersebut. Pernyataan yang tidak tepat jika pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang, dikarenakan objek jaminan fidusia belum diroya fidusia oleh penerima fidusia, meskipun secara unsur menurut Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah terpenuhi. Penerima Fidusia dalam hal ini tidak pantas menerima akibat hukum berupa penjatuhan pidana kepadanya.

Seharusnya akibat hukum yang timbul dari perbuatan fidusia ulang ini dijatuhkan kepada penerima fidusia. Hal ini relevan karena penerima fidusia lah yang menyebabkan pemberi fidusia melakukan fidusia ulang. Penerima fidusia dalam hal ini mengembalikan objek jaminan dalam status masih terdaftar, sehingga jika pemberi fidusia kembali menjaminkan objek tersebut akan terjadi fidusia ulang.

## **PENUTUP**

Produk hukum yang mengatur roya fidusia masih dirasa lemah. Lemahnya produk hukum tentang roya fidusia belum mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat. Ketidaktegasan produk hukum tersebut berakibat sulit menciptakan kepastian hukum, karena untuk menciptakan kepastian hukum dibutuhkan sistem hukum yang kuat, yang memberikan ketegasan hukum dalam masyarakat. Ketegasan hukum dapat diciptakan dengan memberikan sanksi hukum, sehingga masyarakat lebih cenderung melaksanakan dari pada melalaikannya. Tidak tegasnya produk hukum tersebut menandakan tidak adanya kepastian hukum roya fidusia, sehingga fidusia ulang akan tetap mungkin terjadi.

Fidusia ulang objek tanpa roya fidusia termasuk kedalam unsur fidusia ulang yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan terhadap pelanggaran pasal ini mempunyai akibat hukum berupa kreditor yang kehilangan hak preferent atas objek jaminan fidusia dan penjatuhan sanksi pidana kepada pemberi fidusia. Namun penjatuhan sanksi kepada pemberi fidusia tersebut dinilai tidak tepat karena fidusia ulang objek tanpa roya fidusia ini bukan merupakan keinginan atau itikat buruk dari pemberi fidusia, melainkan berawal dari pelanggaran dari penerima fidusia yang tidak memenuhi kewajibannya melakukan roya fidusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Taks:**

- Ibrahim, Johnny, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama. Malang: PT. Bayumedia Publishing
- Naja. HR. Daerng, 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT. Buku Kita.
- Salim, HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia, PokokPokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta:Liberty Offset.

Syah, Modakir Iskandar. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Sagung Seto.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.